BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

TI (Teknologi Informasi) telah menjadi fondasi transformasi digital, yang memungkinkan pengelolaan data dan layanan secara efisien untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik (Panggabean, 2018). TI tentu bukan hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan keunggulan serta peluang bagi organisasi untuk memberikan nilai lebih kepada masyarakat, serta meningkatkan daya kompetitif bagi organisasi yang mampu memanfaatkan potensi TI secara optimal (Laudon & Laudon, 2004). Sedangkan transformasi digital merupakan perubahan secara menyeluruh dari organisasi untuk beroperasi dan memberikan nilai kepada pemangku kepentingan dengan memanfaatkan teknologi digital. Sementara TI, berfokus pada alat dan sistem untuk mengelola Informasi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan. Di sisi lain, teknologi digital merupakan teknologi yang tidak hanya mencakup TI tetapi juga berbagai inovasi dan aplikasi berbasis teknologi sebagai landasan bagi perkembangan transformasi digital itu sendiri (Panggabean, 2018).

Salah satu sektor yang sangat membutuhkan penerapan tata kelola TI dengan baik adalah sektor pemerintahan. Di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi XYZ memanfaatkan TI melalui berbagai inisiatif, seperti Ekosistem Data XYZ yang menghadirkan akses data transparan dan berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, infrastruktur digital diperluas dengan pembangunan jaringan internet dan layanan gratis di area publik (Felayati, 2019). Pemerintah Provinsi XYZ juga mengadopsi teknologi *blockchain* untuk memastikan keamanan layanan dan transparansi, serta menggelar pelatihan literasi digital untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Langkah ini mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi XYZ dalam mendorong inklusi digital dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi teknologi.

Pemerintah Provinsi XYZ merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan TI dan komunikasi di Tingkat provinsi. Pemerintah Provinsi XYZ adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan Informasi, komunikasi publik, serta pengembangan ekosistem dan

infrastruktur teknologi digital di wilayah tersebut. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik berbasis teknologi, Pemerintah Provinsi XYZ dituntut untuk dapat memastikan infrastruktur TI dan layanan digital yang dikelola dapat berjalan secara efektif dan efisien (Safitri dkk, 2021).

Berdasarkan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi XYZ dalam pengelolaan komunikasi dan informatika, kemajuan teknologi yang pesat perlu diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan. Perkembangan ini tentu harus diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan. Salah satu bentuk inovasi teknologi yang signifikan saat ini adalah penggunaan internet, baik untuk memperoleh Informasi maupun sebagai saran komunikasi. Pemerintah Provinsi XYZ berupaya menciptakan pelayanan yang optimal di media internet, seperti melalui situs web, dengan menyediakan Informasi yang relevan bagi masyarakat, instansi pemerintah, maupun pelaku bisnis (Felayati, 2019).

Dalam konteks ini, penerapan tata kelola TI yang efektif menjadi sangat penting. Tata kelola TI yang baik menjadi sangat penting. Tata kelola TI yang baik memastikan investasi TI sesuai dengan tujuan perusahaan, mengurangi risiko TI, dan meningkatkan efisiensi operasional (Joshi dkk, 2022). Untuk meningkatkan tata kelola TI dengan menerapkan *framework* COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technologies*) versi 2019. COBIT 2019 berfokus pada aspek perencanaan dan menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk tata kelola TI (Darmawan & Wijaya, 2022).

Di Pemerintah Provinsi XYZ, penerapan kerangka kerja COBIT 2019 dinilai sangat relevan, terutama dalam domain APO (*Align, Plan, and Organize*). Domain ini mencakup proses-proses yang berfokus pada penyelarasan antara strategi TI dan tujuan bisnis, perencanaan dan pengelolaan sumber daya TI, serta pengorganisasian layanan TI. Domain ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa strategi TI yang diterapkan dapat membantu tujuan bisnis (Joshi dkk, 2022).

Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan tata kelola TI di lingkungan Pemerintah Provinsi XYZ. Salah satu masalah utama adalah belum optimalnya keselarasan strategis antara strategi bisnis dan strategi TI yang diterapkan, sehingga pemanfaatan TI belum mendukung secara maksimal

terhadap pelayanan publik dan pencapaian tujuan strategis organisasi (Safitri dkk, 2021).

Perencanaan dan pengelolaan sumber daya TI pun masih menghadapi kendala, baik dari sisi anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Hal ini berakibat pada pemborosan sumber daya dan kurangnya efisiensi pemanfaatan teknologi. Selain itu, belum terstrukturanya layanan TI menyebabkan integrasi aplikasi dan sistem Informasi berjalan secara parsial, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas layanan publik.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi XYZ juga belum pernah melaksanakan asesmen formal berbasis COBIT 2019, terutama pada domain APO. Ketiadaan asesmen ini membuat organisasi belum memiliki panduan yang terstruktur untuk menilai sejauh mana tata kelola TI telah sesuai dengan standar. Permasalahan yang ada mencakup lemahnya integrasi strategi TI, kurang optimanya pengelolaan sumber daya, serta tidak terstandarisasinya struktur dan layanan TI.

Di Pemerintah Provinsi XYZ, ada banyak hal yang perlu diperbaiki terkait tata kelola TI (TI). Meskipun telah digunakan upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan TI, masalah utama masih ada. Salah satunya adanya kurang keselarasan strategis antara strategi bisnis Pemerintah Provinsi XYZ dan strategi TI yang diterapkan. Tentunya berdampak pada pemanfaatan TI yang belum optimal untuk mendukung layanan public dan pencapaian tujuan strategis organisasi (Safitri dkk, 2021). Selain itu, perencanaan dan pengelolaan sumber daya TI yang belum optimal dari perspektif anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur. Hal ini sering menyebabkan pemborosan sumber daya atau pemanfaatan teknologi yang kurang maksimal. Selain itu, struktur layanan TI yang tidak terstruktur menyebabkan beberapa aplikasi atau sistem Informasi belum terintegrasi dengan baik, yang mengakibatkan penurunan efisiensi dan efektivitas layanan publik yang diberikan. Di Tengah kesulitan-kesulitan ini, Pemerintah Provinsi XYZ harus memperbaiki tata kelola TI secara menyeluruh untuk memaksimalkan peran TI dalam mendukung pelayanan publik (Joshi dkk, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang tata kelola TI di Pemerintah Provinsi XYZ dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 2019,

khususnya dengan fokus pada domain APO (ISACA, 2019). Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi XYZ belum pernah melaksanakan asesmen formal berbasis COBIT dalam pengelolaan teknologi informasinya, sehingga penelitian ini menjadi langkah awal dalam memperkenalkan pendekatan tata kelola yang lebih terstruktur dan terstandarisasi. Diharapkan penerapan domain ini mampu menjawab berbagai tantangan yang ada, seperti lemahnya integrasi dalam perencanaan strategis TI, kurang optimalnya pengelolaan sumber daya, serta ketidaksesuaian antara pengembangan teknologi dan kebutuhan operasional organisasi. Melalui implementasi yang efektif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola TI secara lebih menyeluruh, mendukung peningkatan efisiensi layanan publik, serta memastikan keselarasan setiap inisiatif TI dengan visi organisasi. Hal ini tentu diharapkan dapat menjadi dorongan dalam pengembangan layanan publik yang lebih berkualitas di masa depan, seiring dengan percepatan transformasi digital di Pemerintah Provinsi XYZ (Felayati, 2019).

I.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kondisi *existing* pada implementasi *IT Governance* di Pemerintah Provinsi XYZ berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019, khususnya pada domain APO?
- b. Bagaimana evaluasi tingkat kematangan tata kelola TI di Pemerintah Provinsi XYZ berdasarkan *framework* COBIT 2019 domain APO setelah rancangan implementasi?
- c. Bagaimana perancangan tata kelola TI yang optimal berdasarkan *framework* COBIT 2019 domain APO agar selaras dengan strategi bisnis dan mampu mendukung transformasi digital serta peningkatan kualitas layanan publik di Pemerintah Provinsi XYZ?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis kondisi *existing* implementasi *IT Governance* di Pemerintah Provinsi XYZ berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019, khususnya pada

domain APO (*Align, Plan, and Organize*), guna mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dengan *best practices* dan memberikan rekomendasi peningkatan yang sesuai.

- b. Mengevaluasi tingkat kematangan tata kelola TI di Pemerintah Provinsi XYZ setelah rancangan implementasi berdasarkan *framework* COBIT 2019 pada domain APO diterapkan.
- c. Merancang tata kelola TI yang optimal di Pemerintah Provinsi XYZ, agar selaras dengan strategi bisnis, serta mendukung transformasi digital dan meningkatkan kualitas layanan publik berdasarkan *framework* COBIT 2019 domain APO.

I.4 Batasan Penelitian

Adapun batas penelitian yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berfokus pada domain APO (*Align, Plan, and Organize*) dari kerangka kerja COBIT 2019 di Pemerintah Provinsi XYZ.
- b. Penelitian ini hanya mencakup pada implementasi tata kelola TI di Pemerintah Provinsi XYZ dan tidak mencakup organisasi atau instansi pemerintah lainnya.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini:

1. Bagi organisasi, penelitian ini dapat menjadi contoh atau model bagi instansi pemerintahan lain di Indonesia yang ingin menerapkan atau memperbaiki tata kelola TI mereka, terutama dalam hal penggunaan *framework* COBIT 2019.
2. Bagi peneliti, memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang konsep tata kelola TI, khususnya penerapan kerangka kerja COBIT 2019 pada domain APO, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut penerapan tata kelola TI menggunakan *framework* COBIT 2019, terutama di sektor pemerintahan atau organisasi publik lainnya.